



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan M.T. Hartono Komplek Perkantoran Kereng Humbang
Telepon : 0811-5521-200
KASONGAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PROSES BISNIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan ketatalaksanaan yang merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Standar Operasional Prosedur Pasca Penyederhanaan Birokrasi, perangkat daerah diminta untuk menyusun Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah berdasarkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Garuda No. 1 Kasongan Kabupaten Katingan – Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 4043509, 4043510. Fax (0536) 4043508
Website : portal.katingankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PROSES BISNIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan ketatalaksanaan yang merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Standar Operasional Prosedur Pasca Penyederhanaan Birokrasi, perangkat daerah diminta untuk menyusun Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah berdasarkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Bussiness Proses*);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Katingan Nomor 73 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 540);
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 599);

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;
 2. Surat Edaran Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Standar Operasional Prosedur Pasca Penyederhanaan Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan 2018-2023;
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang lebih efektif dan efisien di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten katingan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



Tembusan :

1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:
u.p. Kepala Bagian Hukum;
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.

KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN KATINGAN 2021-2023

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				TERINTEGRASI			
MISI 6: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN							
21	7.1 MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN	MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN SERTA TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM	A. PEMBINAAN, PEMANTUAN DAN PENGAWASAN PENCEMARAN DAN PENGUSAKAN LINGKUNGAN, TERMASUK LIMBAH B3	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG TERSUSUN	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			B. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	IKLH	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			C. PENGELOLAAN RUANG	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN KATINGAN 2021-2023

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TERBUKA HIJAU (RTH)			N HIDUP	
				PERSENTASE USAHA/KEGIATAN PENGHASILAN LIMBAH B3 YANG DI AWASI	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				PERSENTASE PENINGKATAN KETAATAN USAHA/KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN'	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN KATINGAN 2021-2023

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
					LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
				PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT ADAT YANG DIBINA	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKAT/ KELOMPOK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIBINA	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN KATINGAN 2021-2023

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				PERSENTASE KECAMATAN YANG MENDAPATKAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				PERSENTASE PENGGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUT	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			D. PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	1. JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			E. PENINGKATAN PENGELOLAAN MITIGASI BENCANA	2. JUMLAH WARGA NEGARA			

IDENTIFIKASI PROSES BISNIS
BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
MISI 6: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN							
1	MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN	MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN SERTA TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM	A. PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN B. PENINGKATAN PENGELOLAAN MITIGASI BENCANA	1. JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI 2. JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 3. JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**IDENTIFIKASI PROSES PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN
2018-2023**

NO.	Penjabaran MISI Kedalam, SASARAN (Nama Proses)	UTAMA/PENDUKUNG/LAINNYA	KODE
	MISI - 6 MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN		
1	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Utama	SET. 20.10.01

IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2020
 (Nomenkelatur PMDN No. 90/2019 yang di mutakhirkan dengan Kemendagri No. 050 - 3708 Tahun 2020)

NO.	SUB PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
MISI 6: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN					
1	Program Penanggulangan Bencana	SET. 20.10.01	Kecamatan, TNI/POLRI	CFM 20.10.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lintas sektor yang terkait



PETA SUB PROSES

KTG.20 : MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

INPUT

Kebijakan/regulasi

Kordinasi dan sinkronisasi data

Permintaan informasi, konsultasi, dan layanan

KTG.20.10

PENINGKATAN JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI

KTG.20.10

PENINGKATAN JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

KTG.20.10

PENINGKATAN JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

OUTPUT

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pendataan jumlah penduduk yang terdampak bencana

Masyarakat Sadar bencana

PETA RELASI

MISI 6: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN

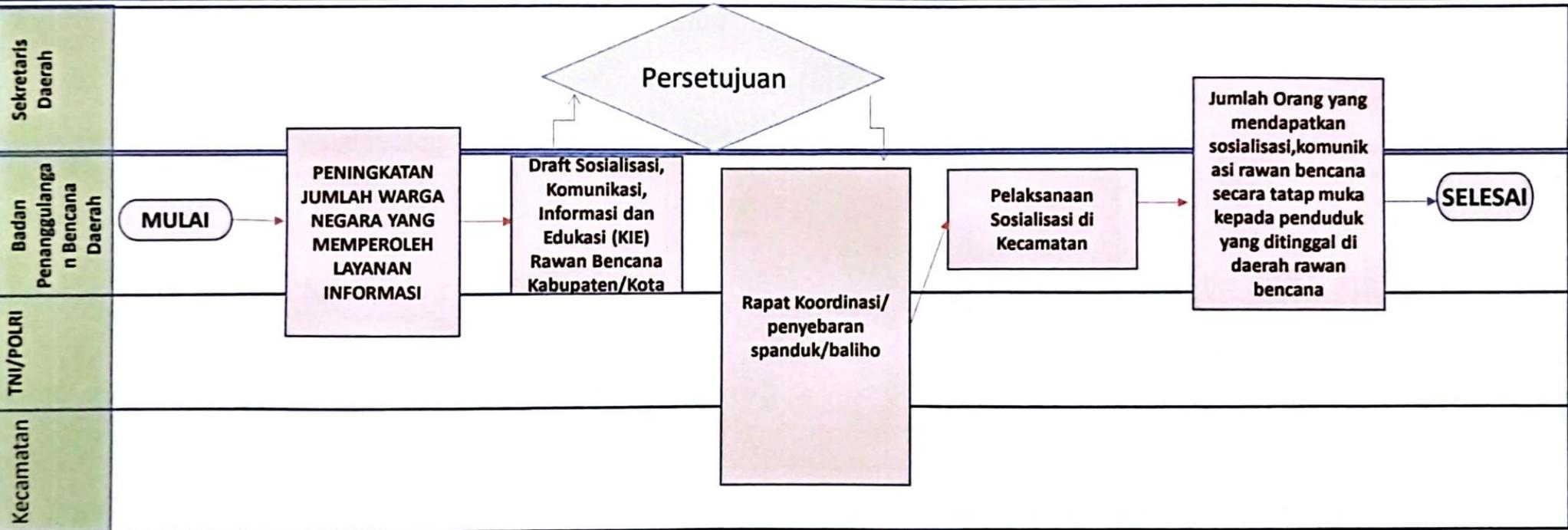
KTG.20 : MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

01. PPROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- 1) Sekretaris Daerah
- 2) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
- 3) TNI/POLRI
- 4) Kecamatan

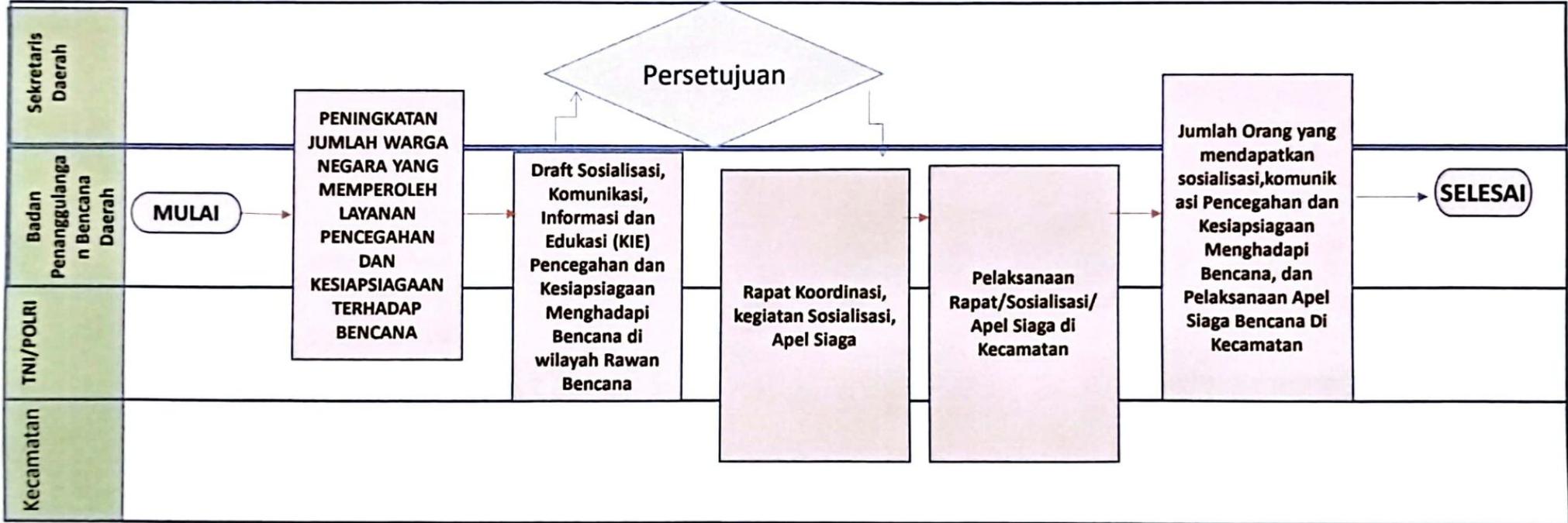
PETA LINTAS FUNGSI

KTG : 20.10. CFM 01 : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA



PETA LINTAS FUNGSI

KTG : 20.10. CFM 01 : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA



PETA LINTAS FUNGSI

KTG : 20.10. CFM 01 : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

